

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

Adapun hasil dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menghambat penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih kurang memahami dan mengerti memakai aplikasi SIKD ini dan juga Pemda membutuhkan waktu untuk melakukan menyesuaikan karena SIKD ini baru diterapkan.
2. Usaha yang dilakukan di Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melakukan kegiatan usaha baik seperti pelatihan dan pembinaan dalam pengelolaan keuangan daerah untuk laporan keuangan yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Daerah (Perda) yang telah ditetapkan.
3. SIKD dapat mewujudkan prinsip *Good Government Governance* (GGG) karena dalam fungsi SIKD yaitu bentuk pertanggungjawaban, penyampaian informasi dan sarana evaluasi berkaitan dengan prinsip GGG yaitu keadilan, transparansi dapat dikontrol dan tanggungjawab memiliki tujuan yang sama yaitu dalam meningkatkan kualitas kinerja dalam menyampaikan laporan keuangan menjadi efektif dan efisien.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Sejalan dengan penerapan SIKD Pemrov sendiri harus mulai membenahi diri terkait dengan penerapan SIKD yang belum maksimal dimana faktor-faktor yang menjadi kendala adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih kurang, oleh karena itu Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu melakukan penambahan pegawai dengan diseleksi terlebih dahulu untuk memilih orang yang memiliki keahlian khusus terutama di bidang sistem informasi akuntansi agar penyampaian laporan keuangan menjadi lebih maksimal dan tepat waktu.
2. Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu melakukan penambahan waktu dalam pembinaan dan pelatihan, jangan hanya satu tahun sekali dalam melakukan pembinaan dan pelatihan seharusnya melakukan pelatihan yang lebih sering lagi, karena dengan melakukan pembinaan dan pelatihan secara intens maka kualitas kinerja semakin meningkat.
3. Agar prinsip dari *Good Government Governance* (GGG) dapat tercapai maka pemerintah harus lebih memaksimalkan dalam penerapan SIKD karena apabila sistem sudah terlaksana dengan baik maka dengan tata kelola pemerintahannya pun akan menjadi lebih baik.
4. Bagi pihak yang tertarik pada penelitian ini, peneliti menyarankan untuk lebih mendalam lagi meneliti tentang SIKD namun dengan objek yang berbeda karena masih banyak hal yang bisa dikupas tentang SIKD karena

SIKD sendiri baru diterapkan di Pemprov Jabar sehingga akan muncul lagi fakta-fakta dan teori yang baru untuk diteliti kembali.

